

LAPORAN PENELITIAN



**DINAMIKA MASYARAKAT NELAYAN DALAM MENGELOLA
HASIL LAUT DI DESA GEMPAL SEWU
KECAMATAN ROWOSARI KABUPATEN KENDAL
TAHUN 1940-2000**

TIM PENELITI:

**DRA. SITI MAZIYAH
DRS. HARYONO RINALDI, M.HUM
DRS. HERMINTOYO**

Dibeyai dengan dana DIK Rutin Universitas Diponegoro Tahun Anggaran
2002, sesuai dengan Perjanjian Pelaksanaan Penelitian Bagi para Dosen
Universitas Diponegoro, Nomor 120/J07.11 PJJ/PL/2002,
tanggal 1 Mei 2002

**PUSAT STUDI SEJARAH DAN BUDAYA MARITIMASIA TENGGARA
LEMBAGA PENELITIAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
2002**

UPT-PUSTAKA UINIB

LEMBAR PENGESAHAN

1. a. Judul Penelitian : Dinamika Masyarakat Nelayan dalam Mengelola Hasil Laut di Desa Gempol Sewu Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal, tahun 1940-2000
b. Bidang Ilmu : Sosial
c. Kategori Penelitian : Menunjang Pembangunan
2. Ketua Peneliti
a. Nama : Dra. Siti Maziyah
b. Jenis kelamin : Perempuan
c. Gol. Pangkat, dan NIP : III A, Penata Muda, NIP. 132 096 082
d. Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
e. Jabatan Struktural : -
f. Fakultas/Jurusan : Pusdi Sejarah dan Budaya Maritim Asteng Lemlit UNDIP
3. a. Jumlah Tim Peneliti : 2 (dua) orang
b. Nama Anggota Peneliti I : Drs. Haryono R., M.Hum.
c. Nama Anggota Peneliti II : Drs. Hermintoyo
4. Lokasi Penelitian : Kabupaten Kendal
5. Jangka Waktu Penelitian : 6 (enam) bulan
6. Biaya yang diperlukan : Rp. 3.000.000,-
Dari Dana DIK Rutin UNDIP (tiga juta rupiah)
Th. Anggaran 2001

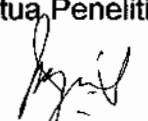
Semarang, 28 Oktober 2002

Mengetahui:

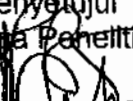
Ketua Pusdi Sejarah dan Budaya
Maritim Asteng Lemlit UNDIP


Prof. Dr. A.M. Djuliaty Suroyo
NIP. 131 602 712

Ketua Peneliti,


Dra. Siti Maziyah
NIP. 132 096 082

Menyetujui


Prof. Dr. Ignatius Riwanto

NIP. 31 529 454



KATA PENGANTAR

Kami mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT., atas selesainya penyusunan laporan kegiatan penelitian yang berjudul "DINAMIKA MASYARAKAT NELAYAN DALAM MENGELOLA HASIL LAUT DI DESA GEMPOL SEWU KECAMATAN ROWOSARI KABUPATEN KENDAL, TAHUN 1940-2000" ini.

Pelaksanaan pekerjaan ini dapat berjalan lancar berkat bantuan dari berbagai pihak, baik dari lembaga-lembaga maupun perorangan. Pada kesempatan ini kami mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ketua Lembaga Penelitian Universitas Diponegoro beserta stafnya yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk melaksanakan pekerjaan penelitian ini.
2. Ketua Pusat Studi Sejarah dan Budaya Maritim Asia Tenggara Lembaga Penelitian Universitas Diponegoro yang telah menyetujui dan merekomendasi dilakukannya kegiatan penelitian ini.
3. Berbagai instansi, lembaga, dan perorangan yang telah membantu kelancaran tugas pelaksanaan kegiatan penelitian dan pembuatan laporan penelitian.

Mudah-mudahan laporan penelitian ini dapat bermanfaat sebagai sumbangan informasi dan pengetahuan serta dapat digunakan sebagai pijakan untuk penelitian-penelitian berikutnya. Jika terdapat kekurangsempurnaan di dalam penelitian ini, mudah-mudahan dapat disempurnakan oleh peneliti selanjutnya.

UPT-PUSTAK-UNDIP
No. Daft.: 366/R/lenlit/c
Tgl. : 11 Ag 2003

Semarang, 28 oktober 2002

Tim Peneliti

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang dan Permasalahan.....	1
1.2. Tinjauan Pustaka.....	3
1.3. Tujuan Penelitian.....	6
1.4. Kontribusi Penelitian.....	6
1.5. Metode Penelitian.....	7
BAB II GAMBARAN UMUM MASYARAKAT DESA GEMPOL SEWU	
2.1. Kondisi Geografis.....	8
2.2. Kondisi Demografis dan Sosial Ekonomi.....	8
BAB III DINAMIKA MASYARAKAT NELAYAN DI DESA GEMPOL SEWU	
3.1. Perkembangan Nelayan Desa Gempol Sewu dalam Lintasan Sejarah.....	10
3.2. Teknologi Penangkapan Ikan	12
BAB IV NELAYAN DAN JARINGANNYA	
4.1. Juragan dan Jurag.....	15
4.2. Keberadaan TPI.....	20
4.3. Pedagang Ikan.....	26
BAB V DINAMIKA PENGELOLAAN HASIL LAUT DI DESA GEMPOL SEWU	
5.1. Pengolahan dan Pengawetan Ikan.....	30
5.2. Distribusi dan Proses Pemasaran Ikan.....	36

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan.....	41
6.2. Saran.....	42
 DAFTAR PUSTAKA.....	 43

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang dan Permasalahan

Sebagian besar wilayah Indonesia berupa perairan, maka penelitian tentang nelayan yang merupakan bagian dari masyarakat bahari mempunyai alasan yang mendasar dan strategis. Nelayan merupakan suatu kelompok sosial yang mempunyai ciri spesifik dengan sumber penghidupannya yang sangat tergantung pada ketersediaan sumber daya laut. Mereka memperoleh pendapatan dari hasil menangkap ikan di laut yang telah tersedia (Sutejo K. Widodo, 1996 : 126). Oleh karena itu, perlu diungkap dan dideskripsikan sebagai fakta sosial yang berguna dalam pengembangan kajian ilmu sosial, terutama yang berhubungan dengan bidang ilmu sejarah maritim.

Salah satu desa nelayan yang ada di Kabupaten Kendal adalah Desa Gempol Sewu yang terletak di Kecamatan Rowosari. Desa ini merupakan desa nelayan tertua di seluruh wilayah Kabupaten Kendal. Keberadaan nelayan di desa itu sudah ada sejak jaman Belanda, mereka bertempat tinggal di Dukuh Tegalkapang, Pengkolsari, Bulusan dan Tengahan. Keberadaan nelayan itu di dukung dengan berdirinya TPI (Tempat Pelelangan Ikan), yang saat itu ada di Dukuh Pengkolsari.

Pada masa sekarang, masyarakat nelayan sudah menyebar ke seluruh dukuh yang ada di Desa Gempol Sewu. Kondisi itu juga didukung dengan kehadiran perahu motor tempel yang mencapai jumlah 1.164 buah, dengan mesin berkekuatan 12 – 30 PK (Monografi Desa Gempol Sewu, 2002). Melihat potensi itu, maka seharusnya nelayan di Gempol Sewu dapat memaksimalkan segala potensi yang mereka miliki. Apalagi di desa ini terdapat sebuah TPI yang cukup representatif. Akan tetapi pada kenyataannya, keberadaan TPI tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal, baik itu oleh desa maupun masyarakat Gempol Sewu. Nelayan banyak yang menjual ikan langsung kepada para tengkulak tanpa melalui

proses lelang di TPI Gempol Sewu. Celakanya, kebanyakan para tengkulak yang beroperasi di Desa Gempol Sewu berasal dari luar desa. Mereka menjual hasil tangkapan nelayan Gempol Sewu ke luar daerah. Hal itu menyebabkan keuntungan terbesar Desa Gempol Sewu dari sektor maritim, tidak dapat dinikmati oleh penduduknya tetapi oleh penduduk luar desa yang memanfaatkan keberadaan nelayan Gempol Sewu. Akibatnya, penduduk Gempol Sewu hanya mampu bertindak sebagai nelayan yang menangkap ikan saja. Mereka tidak pernah dapat memberi nilai tambah terhadap ikan hasil tangkapannya. Seandainya ada kegiatan paska penangkapan ikan, maka hanya berupa pengeringan ikan yang nilai tambahnya tidak begitu besar. Padahal, Gempol Sewu dengan jumlah perahu motor tempel yang lebih dari 1000 buah, sesungguhnya menyimpan potensi ekonomi bahari yang besar, hanya saja hal itu belum dimanfaatkan secara maksimal.

Salah satu bentuk kegiatan ekonomi manusia yang paling awal adalah mengumpulkan hasil alam. Manusia atau kelompok manusia hanya bertindak menangkap dan mengumpulkan segala hal yang telah disediakan oleh alam, mereka tidak mampu memberi nilai tambah apa yang telah diberikan oleh alam. Nelayan tradisional dapat dikategorikan pada kelompok sosial jenis ini, nyaris tidak ada kemajuan teknologi yang berarti bagi nelayan tradisional dalam proses pengolahan hasil tangkapan. Mereka biasanya langsung menjual ikan hasil tangkapan kepada para tengkulak yang telah menunggu mereka di TPI. Apabila ada upaya untuk mengolah hasil tangkapan, maka nyaris tidak ada pemakaian teknologi modern dalam usaha itu. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa nelayan dalam hal pemanfaatan teknologi berada pada urutan yang paling bawah. Dengan demikian, menarik untuk diungkapkan mengapa para nelayan tradisional tidak mempunyai kemampuan untuk mengadopsi kemajuan teknologi yang ada untuk kepentingan pengolahan hasil tangkapan. Pada sisi yang lain, menarik pula untuk diketahui bagaimana kegiatan pengelolaan hasil tangkapan ikan yang ada di Desa Gempol Sewu.

1.2. Tinjauan Pustaka

Selama ini penelitian mengenai nelayan telah dilakukan oleh beberapa peneliti, diantaranya adalah Masyhuri (1995), Mubyarto (1985), Sutejo K. Widodo (1996;2000), dan baru-baru ini dilakukan oleh Dwi Any Laksitawati (2001). Masyhuri mendapatkan gagasan tentang perikanan setelah membaca buku *Children of the Colonial State: Population Growth and economic Development in Java, 1795-1880* karya P. Boomgaard (1989), yang menyebutkan bahwa sektor perikanan dalam abad ke-19 merupakan salah satu dari sektor-sektor terpenting di luar pertanian. Berdasarkan keterangan tersebut disimpulkannya bahwa kelampauan sektor perikanan merupakan obyek studi yang menarik. Penelitian yang dilakukan oleh Masyhuri ini merupakan salah satu karya yang komprehensif dalam bidang perikanan, khususnya menyoroti masalah usaha perikanan laut di Laut Jawa dan Madura pada sekitar tahun 1850-1940 berkenaan dengan masalah sosial-ekonominya.

Penelitian ini dimulai dengan membahas bentuk-bentuk organisasi dari usaha penangkapan ikan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana usaha penangkapan ikan itu dilakukan oleh nelayan di lingkungan laut. Di dalam perkembangannya, pada sekitar tahun 1850-an hingga sekitar tahun 1870-an, usaha penangkapan ikan di Jawa dan Madura mengalami ledakan. Jumlah armada nelayan diperkirakan meningkat cukup tajam, dan produksi ikan yang dihasilkannya dapat memenuhi hampir seluruh konsumsi ikan setempat. Faktor penting yang menyebabkannya adalah adanya investasi yang cukup besar pada sektor penangkapan ikan laut, dan para pachter yang merupakan figur sentral, berperan sebagai motor penggerak lajunya pertumbuhan usaha penangkapan ikan. Mereka berperan sebagai penanam modal sektor penangkapan ikan. Berdasarkan hubungan formal dengan pemerintah yang mereka miliki, mereka berhasil mengembangkan bisnisnya di sektor penangkapan ikan dan perdagangan ikan. Melalui hubungan informal yang mereka kembangkan dengan nelayan, menyebabkan pachter dan

nelayan terkait dalam suatu kelompok yang mempunyai kepentingan bersama dan saling menguntungkan.

Perubahan terjadi sejak akhir tahun 1860-an hingga awal abad ke-20, yaitu berupa perubahan struktural dari usaha penangkapan ikan. Pada periode ini pemerintah menghapuskan sistem sewa pada sektor penangkapan ikan. Hal ini menyebabkan hubungan formal antara pachter dan pemerintah terputus, dan pachter tidak lagi mendapat fasilitas dan kemudahan, khususnya pada hak membeli garam dengan harga yang murah untuk pengawetan ikan. Bagi pachter sektor penangkapan ikan tidak lagi menguntungkan, karena biaya pengawetan ikan meningkat sangat drastis. Beberapa proses pengawetan ikan yang lazim dilakukan oleh nelayan di Indonesia adalah pengasinan, yaitu pengolahan ikan untuk menghasilkan ikan asin atau ikan pedo, pemindangan (ikan pindang), pengeringan (ikan gereh), dan pengasapan ikan (ikan asap). Pengasinan ini merupakan proses pengolahan ikan yang paling mudah dilakukan, dan ikan yang telah diawetkan dapat disimpan dalam waktu yang cukup lama. Selain itu, pengolahan ikan adalah dengan membuat trasi yang tidak memerlukan garam. Akan tetapi, selain tidak dapat dilakukan pada semua jenis ikan, juga pengguna trasi tidak cukup besar terbatas hanya sebagai bahan penyedap masakan.

Periode setelah tahun 1900-an sampai sekitar tahun 1940-an, usaha penangkapan ikan di pantai utara Jawa dan Madura sudah tidak lagi sebagai usaha yang semata-mata bercorak lokal, tetapi lebih dari itu. Meluasnya jaringan transportasi di Pulau Jawa mengakibatkan semakin mudahnya pemasaran ikan ke daerah pedalaman. Hal ini berpengaruh positif pada usaha penangkapan ikan itu. Meskipun demikian, sektor ini dapat dikatakan mengalami kemandegan pada periode ini. Keadaan ini disebabkan adanya persaingan yang timbul akibat meningkatnya aktivitas nelayan-nelayan asing di kepulauan Indonesia, yang mengakibatkan usaha penangkapan ikan di dekat pantai, dan yang semakin kental dengan corak subsisten. Berdasarkan pertumbuhan sektor penangkapan

ikan yang terjadi, dapat disimpulkan bahwa modal usaha dan pemasaran produksi ikan merupakan faktor kunci dalam sektor usaha penangkaran ikan rakyat di Jawa dan Madura.

Nelayan dan Kemiskinan merupakan hasil penelitian Mubyarto, dkk., yang menguraikan masalah kehidupan nelayan di Desa Ujung Batu dan Bulu, Kabupaten Jepara. Pada mulanya kemiskinan yang dialami masyarakat nelayan di daerah itu disebabkan oleh faktor ilmiah, akan tetapi, dalam perkembangannya berkaitan dengan faktor struktural. Berdasarkan sejarahnya, jumlah ikan di pantai Jepara relatif banyak. Sehingga banyak nelayan dari daerah lain datang ke sana, seperti dari Jawa Timur dan daerah sekitarnya. Hal itu mengakibatkan sebagian besar pendapatan ikan itu dibawa ke luar dari Jepara, dan tidak beredar dalam perekonomian nelayan di Jepara. Untuk menanggulangi kemiskinan di daerah itu, pemerintah melaksanakan modernisasi kapal-kapal penangkap ikan. Menurut Mubyarto, memburuknya kehidupan nelayan termiskin di suatu daerah tidak sepenuhnya disebabkan oleh beroperasinya kapal-kapal trawl, tetapi dapat juga disebabkan oleh bekas nelayan tradisional yang telah memiliki kapal-kapal kecil bermotor. Dengan adanya motorisasi itu, telah menimbulkan jurang yang semakin lebar antara yang mampu dengan yang tidak mampu mengoperasikan teknologi maju itu.

Serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh Mubyarto dkk., Any Dwi L. melaksanakan penelitian yang berhubungan dengan masalah kemiskinan di Desa Sendang Sikucing, Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal. Menurut Any, kemiskinan yang dialami masyarakat nelayan itu ditandai dengan rendahnya kesejahteraan dan kurangnya penguasaan terhadap sumber daya alam. Masuknya unsur modernisasi perikanan melalui program motorisasi dapat dipandang sebagai perubahan dalam satu aspek kehidupan masyarakat nelayan yang secara langsung maupun tidak langsung membawa perubahan-perubahan yang berbeda dari sebelumnya.

Perubahan sosial dan struktur sosial pada masyarakat nelayan yang diakibatkan oleh adanya pengaruh teknologi dikupas pula dalam penelitian yang dilakukan oleh Sutejo K. Widodo. Menurutnya, struktur sosial ekonomi nelayan yang terbangun akibat penggunaan teknologi mekanik memperlihatkan adanya kelas sosial juragan yang semakin jelas, yaitu berkurangnya nelayan pemilik skala kecil dan membengkaknya kelas buruh nelayan atau jurag. Kiranya berdasarkan studi pustaka terhadap penelitian-penelitian terdahulu tersebut di atas, belum ada yang menyinggung masalah dinamika pengelolaan hasil laut, khususnya di Desa Gempol Sewu, Kecamatan Rowosari, Kabupaten Kendal. Oleh karena itu, penelitian terhadap permasalahan ini dapat dilanjutkan untuk mengetahui dinamika teknologi pengelolaan hasil laut di daerah itu, khususnya pada sekitar tahun 1940 hingga tahun 2000.

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kehidupan sosial ekonomi nelayan Desa Gempol Sewu, terutama yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan hasil tangkapan. Selain itu penelitian ini bertujuan mengetahui faktor – faktor yang menghambat pemanfaatan teknologi bagi nelayan dalam proses kegiatan paska penangkapan.

1.4. Kontribusi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan bagi khasanah ilmu sosial terutama yang berkaitan dengan sektor maritim. Pada sisi yang lain, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pijakan dasar bagi pemerintah pada umumnya, maupun Pemerintah Kabupaten Kendal dalam upaya meningkatkan kesejahteraan nelayan. Selain itu, secara mikro, hasil penelitian ini diharapkan dapat mengungkapkan faktor – faktor yang menjadi sebab rendahnya inovasi teknologi bagi nelayan dalam hal pengelolaan hasil tangkapan.

1.5. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah dalam upaya mendapatkan data dan fakta yang ada di lapangan. Dalam metode sejarah, langkah pertama ialah apa yang disebut sebagai *heuristik* atau pengumpulan sumber. Oleh karena *scope spatial* adalah sebuah desa, maka sulit untuk memperoleh sumber tertulis sebagai sumber primer. Kondisi itu memaksa tim peneliti untuk menggunakan metode *oral history* agar dapat memperoleh data yang lengkap dan komprehensif mengenai permasalahan yang ada. Dengan demikian tim peneliti harus melakukan wawancara terhadap beberapa informan yang benar – benar mengetahui permasalahan. Sebelum hal itu dilakukan, maka tim peneliti perlu melakukan observasi lapangan untuk memperoleh gambaran umum mengenai kehidupan nelayan di Desa Gempol Sewu. Tahap kedua adalah apa yang dikenal sebagai *kritik*, yaitu memilih dan menentukan mana sumber yang relevan dengan penelitian kita, serta mana yang tidak relevan dengan tema penelitian kita. Selain itu kritik juga bermanfaat untuk menyeleksi apakah suatu sumber sejarah dapat dipercaya atau tidak. Tahap ketiga adalah *interpretasi*, yaitu mensintesis segala fakta – fakta yang ada di lapangan. Langkah terakhir adalah *historiografi*, yaitu proses penulisan segala fakta yang ada menjadi sebuah tulisan sejarah.

BAB II

GAMBARAN UMUM MASYARAKAT DESA GEMPOL SEWU

2.1. Kondisi Geografis

Desa Gempol Sewu adalah desa yang terletak di Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal. Wilayahnya yang seluas 474.070 HA ini, terdiri atas sebagian kecil wilayah perkampungan (19.000 HA), dan sebagian besar merupakan tanah sawah irigasi teknis (66.760 HA), tanah kering yang berupa kebun (40.352) maupun padang rumput (47.050), serta tambak (53.000). Pada wilayah yang luas ini terbagi menjadi 17 pedukuhan, 17 rukun kampung (RK), serta 76 rukun tetangga (RT) (Monografi Desa Gempol Sewu, 2002).

Adapun topografi daerah ini adalah sebagai berikut. Di sebelah barat dibatasi oleh Sungai Kutero, di sebelah utara dibatasi oleh Desa Sendang Sikucing, di sebelah timur dibatasi oleh Desa Bulusari, di sebelah selatan dibatasi oleh Desa Rowo Sari dan Desa Gebang Anom. Keberadaan sungai di wilayah ini mempunyai peran yang sangat besar terhadap dinamika kehidupan masyarakat di sekitarnya serta masyarakat desa pada umumnya.

2.2. Kondisi Demografi dan Sosial Ekonomi

Penduduk Desa Gempol Sewu berjumlah 11.796 jiwa, dengan 3.696 Kepala Keluarga. Berdasarkan monografi Desa Gempol Sewu tahun 2002, dapat diketahui bahwa angka pertumbuhan penduduk di desa ini cukup tinggi. Hal ini terlihat dari jumlah penduduk usia balita yang cukup besar, kurang lebih sekitar 20 %. Adapun penduduk usia sekolah kurang lebih berjumlah 30 %, selebihnya adalah penduduk usia produktif atau pekerja serta sebagian kecil berusia lanjut.

Tingkat kesejahteraan penduduk pada umumnya relatif rendah, hal ini terlihat dari bentuk bangunan perumahan masyarakat pada umumnya. Sebagian besar masyarakat desa ini, kurang lebih 70 %, rumahnya

berdinding bamboo, tingkat di atasnya sebagian kecil berdinding kayu atau papan (10%), selanjutnya sebagian berdinding batu (22 %), adapun yang rumahnya berdinding batu hanya sebagian kecil saja (3 %). Kondisi tersebut ternyata dipengaruhi oleh mata pencaharian yang mereka lakukan. Mayoritas penduduk daerah ini, sekitar 70 %; bermata pencaharian sebagai nelayan, sedangkan 30 % lainnya adalah sebagai petani, pedagang, pegawai negeri sipil, dan pedagang. Akan tetapi, berdasarkan data yang terdapat dalam monografi ternyata sebagian besar masyarakat desa ini merupakan buruh (60 %), baik itu sebagai buruh tani, nelayan, industri rumah tangga, maupun sebagai buruh bangunan.

BAB III

DINAMIKA MASYARAKAT NELAYAN DI DESA GEMPOL SEWU

3.1. Perkembangan Nelayan Desa Gempol Sewu dalam Lintasan Sejarah

Pada mulanya daerah ini sebenarnya merupakan daerah yang subur untuk pertanian, dilengkapi dengan sarana irigasi yang memungkinkan air selalu mengalir setiap saat. Kemunculan daerah ini sebagai daerah nelayan sebenarnya sudah cukup lama, yaitu sejak masa penjajahan Belanda, pada tahun 1940-an. Berdasar data yang diperoleh di lapangan, diketahui bahwa pada mulanya hanya empat dusun saja yang menjadi daerah nelayan itu, yaitu dusun Tegal Kapang, dusun Bulusan, dusun Pengkolsari, dan dusun Tengahan. Keberadaan sungai yang cukup besar dan dalam di Gempol Sewu sangat mendukung aktivitas para nelayan ini. Mereka pada umumnya melaut dengan menggunakan perahu tradisional, yaitu perahu layar, dan menggunakan tenaga manusia. Pada umumnya nelayan melakukan penangkapan ikan dengan bantuan angin darat pada sore hari atau malam hari, dan kembali dengan bantuan angin laut pada keesokan harinya. Dengan bantuan angin laut ini, para nelayan pada umumnya dapat mencapai darat lagi sekitar tengah hari. Pada waktu itu tidak setiap saat para nelayan dapat melaut, hal itu dipengaruhi oleh adanya perubahan musim yang sangat mengganggu jalannya aktivitas melaut. Angin laut yang tidak bersahabat, serta ombak yang besar merupakan halangan utama untuk melaut. Pada masa yang demikian itu dinamakan sebagai masa "paceklik" bagi nelayan, karena mereka tidak berani untuk melaut, dan sebagai akibatnya mereka tidak mendapatkan perolehan hasil apapun.

Keberadaan nelayan semakin banyak dan menyebar hampir ke seluruh pedukuhan di Gempol Sewu seiring dengan diberikannya kemudahan-kemudahan oleh pemerintah, yaitu dengan adanya kredit untuk pembelian motor tempel sebagai sarana untuk melaut. Kemunculan

perahu motor tempel ini mulai pada tahun 1970-an. Pemakaian mesin untuk kapal di Gempol Sewu dirintis oleh Bapak Wihadi, dan pada saat itu di Weleri mulai banyak dijual mesin motor tempel berkekuatan 3-6 PK dengan merek Honda dan Kawasaki. Harga satuan motor temple itu sekitar Rp. 30.000. Bapak Wihadi inilah yang pertamakali menggunakan mesin motor untuk perahunya. Dengan perahu bermesin, didapatkan beberapa keuntungan seperti jelajah kapal yang semakin luas yang berarti pendapatan akan semakin menguntungkan, waktu melaut semakin singkat, dan tenaga serta bekal melaut lebih irit. Akan tetapi, konsekwensi yang disandang oleh pemilik kapal adalah adanya modal untuk melaut yang semakin besar karena harus membeli solar terlebih dahulu sebagai bahan bakarnya. Melihat keuntungan-keuntungan seperti itu, maka kemudian para nelayan di Gempol Sewu mulai meninggalkan teknologi tradisional yang mereka peroleh dari orang tua mereka secara turun-temurun. Selain itu, melihat adanya keuntungan-keuntungan yang menarik itu, banyak di antara para petani yang kemudian menjual sawah-sawah mereka untuk membeli perahu sebagai sarana utama untuk melaut. Secara berbondong-bondong, mereka beralih profesi sebagai nelayan.

Setelah menggunakan motor tempel ini hampir dapat dikatakan bahwa para nelayan tidak mengenal musim "paceklik", karena mereka tetap dapat melaut pada waktu kapanpun. Istilah "paceklik" biasanya mereka gunakan jika hasil tangkapan tidak sesuai dengan taksiran awal pada waktu berangkat melaut. Kecilnya hasil tangkapan ini kemungkinan disebabkan karena semakin banyaknya nelayan yang melaut menggunakan motor tempel tanpa ada waktu jeda, sehingga ikan-ikan tidak mempunyai kesempatan untuk berkembangbiak. Selain itu, keberadaan kapal-kapal besar yang menggunakan jaring trawl sangat merugikan bagi nelayan kecil, karena ikan-ikan kecil pun banyak yang mati akibat dari pengaruh jaring itu.

Pada sekitar tahun 1990-an, nelayan di Gempol Sewu mengalami kemajuan teknologi kelautan dengan diperkenalkannya kapal jenis Purse

Seine. Kapal ini memerlukan tenaga kerja yang relatif besar yang mengakibatkan semakin meningkatnya kebutuhan tenaga kerja di sector perikanan laut. Oleh karena itu, kemudian banyak didatangkan tenaga-tenaga bayaran untuk melaut dari daerah sekitar, seperti dari daerah Tambaksari, daerah Rowosari, dan daerah Gebanganom. Kondisi seperti ini ternyata terus berlanjut hingga saat ini, sehingga sampai sekarang banyak terdapat penduduk dari daerah luar Gempol Sewu yang bekerja pada kapal-kapal milik warga Gempol Sewu.

Terjadinya peningkatan pendapatan ikan oleh para nelayan itu ternyata menarik banyak pendatang dari daerah lain untuk ikut berpartisipasi dalam usaha pengelolaan ikan. Para pendatang itu biasanya adalah para pembeli produk nelayan, baik dalam bentuk ikan segar maupun ikan olahan. Kebanyakan mereka datang dari daerah Karang Ampel, dekat Cirebon. Adanya aktivitas yang semakin padat di Gempol Sewu menyebabkan para pedagang ini mendatangkan keluarganya untuk ikut membantu bekerja. Pada mulanya mereka hanya mengontrak sebuah tempat sebagai sarana aktivitasnya, dan dalam perkembangannya mereka kemudian menetap di Gempol Sewu. Dengan demikian dapat diketahui bahwa pada mulanya, yaitu pada saat digunakan peralatan tradisional para nelayan itu merupakan penduduk asli dari Gempol Sewu. Pada perkembangannya, seiring dengan kemajuan teknologi sarana kelautan, maka nelayan di Gempol Sewu tidak hanya berasal dari penduduk asli, tetapi juga berasal dari para pendatang.

3.2. Teknologi Penangkapan Ikan

Keberadaan perahu sebagai sarana untuk melaut sangat diperlukan oleh para nelayan. Dengan adanya teknologi yang moderen, para nelayan yang pada mulanya menggunakan perahu layar sebagai sarana untuk melaut sekarang telah menggunakan perahu bermesin, sehingga hasil tangkapannya menjadi lebih banyak. Berdasarkan alat

yang digunakan untuk melaut, perahu di Gempol Sewu dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Perahu *Sopek*

Perahu ini merupakan perahu terkecil yang digunakan di daerah ini. Perahu ini hanya memuat 2 orang sampai 3 orang ABK (Anak Buah Kapal). Perahu ini panjangnya kurang lebih 7 m dan lebarnya 3,75 m. Perahu ini hanya dapat berlayar sekitar 6 jam saja. Jenis tangkapannya setiap hari berbeda tergantung dengan musimnya. Ikan yang sering ditangkap oleh perahu ini adalah jenis teri nasi, tongkol, dan jika sedang musim udang mereka menangkapnya dengan menggunakan jaring kantong. Adapun jaring yang digunakan untuk menjaring tongkol adalah jaring tongkol yang panjangnya kurang lebih 250 m. Pada saat ini perahu kecil seperti ini telah menggunakan mesin, meskipun mesin yang digunakan adalah mesin mobil bekas yang sudah dimodifikasi. Jenis perahu kecil yang lain adalah *jukung*, *menthung*, dan sebagainya.

2. Perahu *Cantrang*

Perahu ini merupakan jenis perahu sedang, yang memuat 8 orang sampai 12 orang ABK. Ukuran panjang perahu ini kurang lebih 8,5 sampai 9 m dan lebarnya 4 m. Perahu ini berlayar selama 12 jam, hasil tangkapannya biasanya teri nasi dan tongkol. Perahu ini telah memakai mesin yang terletak di bagian bawah kapal.

3. Perahu *Ampera*

Perahu *Ampera* merupakan jenis perahu sedang dan dilengkapi dengan mesin penarik jala. Perahu ini dapat memuat kurang lebih 15 orang ABK dengan kapasitas tangkapan maksimal 3 ton ikan. Jenis perahu sejenis adalah *grayak*. Perahu *Bundes* adalah jenis perahu yang relatif lebih besar dengan kapasitas awak kapal sejumlah 18-20 orang.

4. Perahu *Purse Seine*

Perahu ini merupakan perahu bermotor yang berkapasitas maksimum 10-12 ton ikan. Di dalam perahu ini dilengkapi dengan *lobang* ,

yaitu tempat es yang digunakan sebagai tempat pengawetan ikan, dan *prapen*, sebagai tempat untuk memasak. Perahu jenis ini terbagi menjadi:

- a. *Purse Seine Mini Unyil*, yaitu jenis perahu *Purse Seine* yang memiliki ABK sekitar 25 orang. Perahu ini biasanya berlayar sampai tiga hari, hasil tangkapan biasanya ikan tongkol.
- b. *Purse Seine Mini*, adalah perahu jenis *Purse Seine* yang panjangnya kurang lebih 10-11 m dan lebarnya 5,5 – 6 m dengan ABK sebanyak 30 orang. Perahu ini biasanya menggunakan jarring arat yang panjangnya sekitar 600 m. Perahu ini dapat berlayar sampai 30 hari dengan perbekalan kurang lebih Rp. 1.600.000,00.
- c. *Purse Seine Besar*, merupakan jenis perahu besar yang panjangnya kurang lebih 30 m dan lebarnya 9 m dengan harga sekitar Rp. 1,5 milyar. Kapal ini memiliki ABK sekitar 40 orang, dengan masa berlayar 3 bulan. Setiap pelayaran, kapal ini menghabiskan perbekalan Rp. 80 juta – Rp. 100 juta. Kapal ini biasanya menangkap ikan bawal putih, tongkol, bluntak, dan lain-lain.

Para ABK dalam perahu itu masing-masing mempunyai sebutan sesuai dengan tugasnya, seperti *jelarus*, tugasnya memasang jarring ke laut; *bocahan*, tugasnya memasang jarring ke laut dan memasak bagi para ABK; *pasoran*, tugasnya berbelanja untuk kelengkapan perbekalan; *matares*, tugasnya membetulkan mesin perahu; *nahkoda* atau *juru mudi*, tugasnya mengemudikan kapal; *juru bidang*, tugasnya membangun ABK untuk menarik jala, dan sebagainya. Masing-masing petugas itu memiliki "harga" bayaran sendiri-sendiri sesuai dengan tingkat besar-kecilnya tanggungjawab yang harus dilakukannya.

BAB IV NELAYAN DAN JARINGANNYA

4.1. *Juragan dan Jurag*

Masyarakat nelayan adalah masyarakat yang menggantungkan cara hidupnya pada sektor perikanan laut. Masyarakat yang demikian itu tidak terbatas hanya pada nelayan saja, akan tetapi juga termasuk di dalamnya para pembuat perahu, pengelola hasil nelayan, pedagang, penjual dan pembuat es, bahan bakar, tali-temali, peralatan-peralatan melaut, dan persediaan-persediaan lain yang digunakan oleh nelayan. Semua aktivitas itu saling melengkapi antara satu dengan lainnya, dan semuanya terpusat pada aktivitas perikanan laut. Jaringan yang semacam itu telah terjadi secara turun-temurun dan sulit untuk diubah, kecuali dalam hal teknologi penangkapan ikan itu sendiri.

Menurut Masyhuri, susunan masyarakat nelayan sangat dipengaruhi oleh organisasi penangkapan ikan dan tingkat pendapatan mereka yang cepat. Semakin strategis posisinya dalam organisasi kerja nelayan dan semakin besar pendapatan mereka, maka semakin besar pula kemungkinan mereka menempati posisi yang tinggi dalam stratifikasi social. Sebaliknya, semakin kecil pendapatan mereka dan semakin tidak strategis peran mereka dalam organisasi penangkapan ikan, semakin rendah pula posisi mereka dalam masyarakat. Dalam konteks seperti ini, *juragan* menempati posisi yang lebih tinggi dari pada nelayan (Masyhuri, 1995: 115).

Pada masyarakat nelayan di Gempol Sewu rupanya terdapat stratifikasi sosial berdasarkan kepemilikan kapal. Kelompok pertama adalah para pemilik kapal yang sering disebut sebagai *juragan*. Adapun kelompok kedua adalah nelayan buruh yang terdiri dari para anak buah kapal (ABK) yang terbagi-bagi berdasarkan tugas yang harus dijalankannya, seperti *juru mudi*, *juru bidang*, *juru layar* dan sebagainya. Pada umumnya kelompok ini disebut sebagai *jurag*. Kelompok nelayan ini

tidak memiliki kapal sendiri, akan tetapi ada juga nelayan buruh yang memiliki kapal sendiri berkat keuletannya dalam menabung sehingga dapat digunakan untuk membeli kapal dan menjadi *juragan* untuk kapalnya. Di Gempol Sewu banyak terjadi kasus seperti ini, yaitu buruh nelayan yang dapat meningkat menjadi *juragan*. Kehidupan nelayan buruh tersebut biasanya pas-pasan, oleh karena itu kehidupan mereka sangat tergantung kepada *juragannya*.

Para *juragan* ini biasanya memiliki lebih dari satu kapal, mereka pun mempunyai modal yang cukup untuk meningkatkan usahanya. Selain memiliki kapal, para *juragan* ini juga memiliki perlengkapan lain sebagai sarana untuk melaut seperti jarring, modal awal, serta mesin kapal. Seorang *juragan* atau pemilik kapal belum tentu ikut pergi melaut, kebanyakan mereka hanya menyediakan kapal-kapalnya untuk dijalankan oleh para *juragnya*. Menurut Masyhuri, *juragan* yang seperti itu namanya *juragan darat*. Sedangkan *juragan* yang ikut melaut dan terlibat langsung dalam aktivitas penangkapan ikan, baik mereka yang memiliki alat produksi maupun yang tidak disebut sebagai *juragan laut* (Masyhuri, 1995: 116-117). Kelompok *juragan darat* baik secara sosial ataupun ekonomi umumnya dipandang berkedudukan lebih tinggi dari pada *juragan laut*. Mereka dapat berasal dari kalangan nelayan sendiri, dapat juga bukan nelayan yang sebenarnya, dalam pengertian usaha penangkapan ikan sebenarnya bukan pekerjaan utama mereka.

Hubungan antara *juragan* dan *jurag* ini cukup unik. Kedua kelompok nelayan ini terlibat dalam hubungan *patron-clien* yang cukup ketat. Ada beberapa jenis kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing kelompok nelayan agar hubungan simbiosis di antara mereka dapat berjalan lancar. Pendapatan nelayan yang tidak menentu mengakibatkan hubungan piutang antara *juragan* dan *jurag* sangat mudah terjadi. *Juragan* memanfaatkan kondisi seperti ini dan berusaha sedapat mungkin mengikat anggota kelompoknya dengan ikatan hutang piutang kepadanya.

Seorang *juragan* harus bertindak sebagai pemberi hutang apabila si *jurag* membutuhkan uang. Terutama jika musim peceklik tiba, seorang *juragan* juga harus siap menyediakan keperluan uang bagi *jurag-juragnya*. Pada sisi yang lain seorang *juragan* dituntut untuk memenuhi kebutuhan minimum para *juragnya*. Mereka pula yang harus menyediakan perbekalan kapal untuk dibawa selama mereka pergi menangkap ikan, apabila para *juragnya* hendak melaut. Sebagai konsekuensinya, para *jurag* dituntut loyalitasnya dalam bekerja kepada *juragan* itu, meskipun mendapat penawaran yang lebih menguntungkan dari *juragan* lain. Apabila kewajiban-kewajiban seorang *juragan* tidak dipenuhi, maka terdapat dua kemungkinan yang akan dilakukan oleh nelayan *juragnya*. Pertama, nelayan *jurag* akan berpindah ke *juragan* lainnya; kedua, *jurag* akan menjual ikan hasil tangkapannya dan hasil penjualan tersebut tidak disetor kepada *juragannya*.

Hubungan kedua kelompok nelayan itu di Desa Gempol Sewu juga tercermin dalam sistem pembagian hasil di antara mereka. Dalam sistem bagi hasil itu pembagiannya tergantung pada jenis perahunya. Perahu *Cantrang* sistem bagi hasilnya adalah 50% : 50% untuk *juragan* dan *juragnya*, setelah dipotong biaya perbekalan. Perahu jenis *Bundes*, 40% : 60%; perahu jukung, 50% : 50%.

Seorang *juragan* ada juga yang merangkap menjadi seorang tengkulak. Hal ini disebabkan ia merasa mempunyai modal yang cukup besar yang dapat digunakan untuk mengembangkan usahanya. Para *jurag* apabila tidak mendapatkan hasil tangkapan yang banyak biasanya mereka akan meminjam uang kepada *juragannya* untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebagai konsekuensinya mereka harus menjual ikan hasil tangkapannya kepada *juragan* tersebut sebagai pembayaran hutangnya sampai lunas. Pada kasus yang demikian inilah *juragan* tersebut bertindak sebagai tengkulak, dan tentu saja harga ikan yang diberikan oleh tengkulak itu lebih rendah dari harga pasaran. Dalam hal

ini, tentu saja tengkulak itu akan mendapatkan hasil yang sangat besar karena ia akan menjual ikan-ikan itu ke pasar-pasar yang lebih besar.

Para nelayan sewaktu-waktu dapat pula membuat kontrak pinjaman modal baru sebelum pinjaman terdahulu terbayar lunas. Tengkulak memberikan pinjaman lagi sebesar pinjaman sebelumnya, termasuk sisa hutang yang belum dilunasi. Dalam situasi tertentu apabila nelayan memerlukan uang kontan, mereka juga meminjam kepada tengkulak dengan persyaratan khusus, yaitu ikan yang mereka jual kepada tengkulak dinilai lebih rendah dari harga pasar, sampai hutang mereka lunas terbayar. Pada masa nelayan harus melakukan penangkapan ikan, segala kebutuhan operasional seperti bahan makan disediakan oleh tengkulak yang biasanya dengan harga yang sangat mahal. Dengan praktek-praktek seperti ini, tengkulak berusaha mengikat nelayan agar selama mungkin terikat hutang padanya. Nelayan dekat pantai hampir semuanya terikat hutang kepada para pedagang ikan setempat. Mereka harus menjual ikan yang berhasil mereka tangkap kepada para pedagang ini meskipun ikan hasil tangkapannya dinilai dengan harga yang sangat rendah.

Pola penanaman modal seperti itu terjadi pada hampir semua masyarakat nelayan. Sementara yang lainnya apabila tidak terikat hutang kepada para pemilik perahu, mereka terikat hutang kepada para pelepas uang setempat. Dengan pola penanaman modal seperti ini, berkembanglah semacam monopoli kelompok-kelompok tertentu pada sector penangkapan ikan. Suatu kenyataan bahwa sebagian besar nelayan pada saat ini terikat pada para pelepas uang, khususnya nelayan-nelayan lepas pantai. Meskipun terjadi perdagangan ikan bebas, tetapi sebagian besar nelayan tidak mempunyai kebebasan menjual ikan yang mereka hasilkan kecuali kepada para pemberi modal yang pada umumnya telah cukup mapan menguasai jaringan perdagangan ikan segar (ANRI). Nelayan-nelayan yang bekerja dengan modal pinjaman pada umumnya membayar hutang dalam bentuk ikan dalam jumlah tertentu dari ikan yang

dihasilkannya. Selebihnya yang merupakan bagian mereka, pada umumnya dijual pula kepada penyedia modal. Ada juga cara lain untuk membayar hutang kepada pelepas uang, yaitu dengan cara menjual seluruh ikan yang dihasilkannya dengan harga 10% lebih murah dari harga pasar. Hal ini berlangsung terus sampai hutang yang tertanggungkan terbayar lunas. Dengan demikian, kelompok pemodal menguasai perdagangan ikan yang pada gilirannya memungkinkan terjadinya akumulasi keuntungan pada mereka. Nelayan-nelayan yang tidak terikat hutang kepada pelepas uang sering mendapatkan kesulitan memasarkan ikan mereka apabila hasil tangkapan mereka melimpah. Pada saat-saat seperti itu, pedagang-pedagang ikan cukup menampung ikan dari nelayan yang terikat kepada mereka.

Bagi nelayan yang terikat hutang, pola perdagangan yang seperti ini kurang menguntungkan. Mereka hampir tidak pernah menerima harga ikan yang lebih baik, meskipun harga ikan meningkat. Hal ini disebabkan oleh dominannya kelompok pemberi modal dan juga karena kurang adanya persaingan antara pedagang-pedagang ikan. Dalam hal ini, transaksi "ngalap nyaur" semakin mendapatkan bentuknya. Ikan-ikan yang berhasil didaratkan ditampung oleh pemberi modal atau pedagang ikan tertentu dengan harga yang telah disepakati bersama, dan baru dibayar setelah ikan terjual. Akan tetapi, sangat sering terjadi nelayan menerima pembayaran dengan harga yang lebih rendah dari yang telah disepakati dengan alasan harga ikan di pasar merosot. Mereka terpaksa menerimanya, apabila tidak maka pedagang-pedagang itu keberatan menerima atau menjualkan ikan yang ditangkap pada hari itu. Nelayan dalam hal ini tidak saja tidak pernah mendapatkan harga ikan yang lebih tinggi, bahkan selalu mendapatkan harga yang lebih rendah. Dengan demikian, membaiknya pendapatan dari sektor penangkapan ikan, bila hal ini terjadi, lebih banyak dinikmati oleh pelepas uang atau para pedagang ikan daripada nelayan sendiri.

Kemunculan tengkulak itu disebabkan oleh beberapa hal, yang sekaligus sebagai keunggulannya, yaitu karena lemahnya system permodalan nelayan kecil; adanya aturan di *kongsi* (TPI) yang hanya menerima penjualan ikan dalam partai besar; system pembayarannya yang lebih mudah, yaitu dengan pembayaran tunai, tidak seperti di *kongsi* yang berbelit-belit; tengkulak lebih operasional dalam pelaksanaannya dan aktif menjemput para nelayan di kapalnya; serta perasaan nelayan yang merasa berhutang budi kepada tengkulak yang memaksakan dirinya untuk menjual ikan hasil tangkapannya kepada tengkulak itu. Meskipun demikian, ada beberapa kelemahan yang dimiliki oleh tengkulak itu, yaitu harga belinya rata-rata berada di bawah harga pasar; harga beli ditentukan secara sepihak oleh tengkulak; dan di dalam mempertahankan hubungan *patron client* biasanya tengkulak memberikan pinjaman dengan bunga yang cukup tinggi.

4.2. Keberadaan TPI

Keberadaan TPI bagi desa nelayan merupakan pusat kehidupan masyarakatnya, demikian pula halnya yang terjadi di Gempol Sewu. Keberadaan TPI yang sering disebut sebagai *kongsi* oleh masyarakat setempat itu letaknya berpindah-pindah. Pada zaman Belanda, TPI terletak di dusun Pengkolsari. TPI yang sekarang merupakan bangunan baru yang diresmikan pada tahun 2000. Letak TPI sebelumnya menempati bangunan yang sekarang menjadi pasar Desa Gempol Sewu, yang berjarak kurang lebih 100 m dari bangunan TPI sekarang. Pemandahan lokasi tersebut dilakukan agar jarak antara dermaga dengan TPI menjadi lebih dekat, dengan demikian waktu yang digunakan untuk menurunkan ikan dari perahu ke TPI menjadi lebih singkat.

Keberadaan TPI di desa Gempol sewu merupakan TPI terbesar di Kabupaten Kendal. Hal itu terlihat dari bangunan fisik, jumlah perahu yang berlabuh, sampai jumlah retribusi yang disetorkan ke pemerintah kabupaten. Retribusi yang masuk ke dalam kas Pemerintah Kabupaten

Pemindahan lokasi tersebut dilakukan agar jarak antara dermaga dengan TPI menjadi lebih dekat, dengan demikian waktu yang digunakan untuk menurunkan ikan dari perahu ke TPI menjadi lebih singkat.

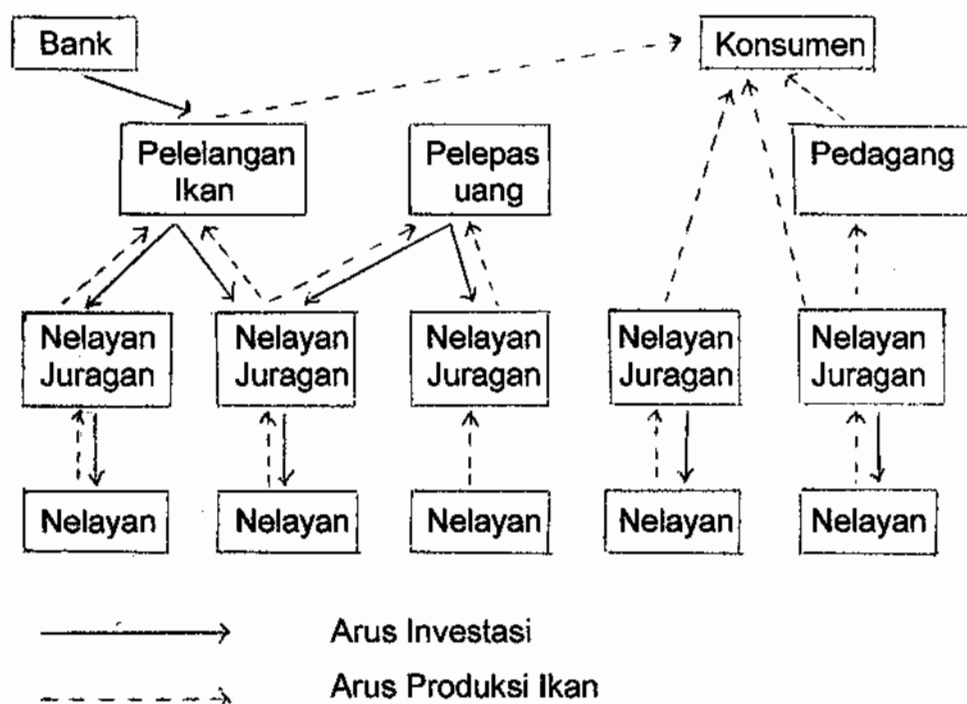
Keberadaan TPI di desa Gempol sewu merupakan TPI terbesar di Kabupaten Kendal. Hal itu terlihat dari bangunan fisik, jumlah perahu yang berlabuh, sampai jumlah retribusi yang disetorkan ke pemerintah kabupaten. Retribusi yang masuk ke dalam kas Pemerintah Kabupaten Kendal dari TPI tersebut pada tahun 1999 berjumlah Rp. 1,2 Milyar; tahun 2000 berjumlah Rp. 1,5 Milyar; dan pada tahun 2001 berjumlah Rp. 1,8 Milyar.

Menurut sejarah berdirinya organisasi kenelayanan, koperasi nelayan yang pertama kali didirikan adalah koperasi tempat pelelangan, yang sekarang disebut sebagai TPI, di Tegal pada tahun 1912. Kemunculan TPI ini pada awalnya sebenarnya merupakan kesadaran ke arah perubahan yang semakin tumbuh di kalangan sebagian anggota masyarakat nelayan di Tegal, serta karena semakin gencarnya propaganda dari organisasi-organisasi pergerakan nasional pada waktu itu yang mendorong mereka untuk melakukan perubahan terhadap keadaan mereka yang kurang menguntungkan itu. Hampir semua nelayan di tempat tersebut berada dalam cengkeraman para pelepas uang. Oleh karena itu, ketika F.W. der Rijk van der Gracht mendorong sejumlah nelayan untuk mendirikan organisasi sebagai wadah dalam menghadapi dan memecahkan berbagai masalah yang mereka hadapi secara bersama-sama, sebagian nelayan di daerah itu dapat menerimanya. Der Rijk van der Gracht adalah seorang kontrolir B.B. setempat yang mempunyai perhatian besar terhadap perbaikan nasib nelayan (Masyhuri, 1995: 219). Dengan berdirinya koperasi itu, maka sejumlah nelayan di tempat itu, terutama juragan-juragan laut yang belum memiliki perahu atau juragan-juragan laut yang masih terikat hutang kepada penyedia modal, berhasil mengorganisasikan diri berdasarkan pengetahuan mereka tentang kongsi Cina yang terdapat di Jakarta. Organisasi ini mempunyai

susunan dan cara kerja yang sama dengan kongsi Cina di Jakarta, yaitu sebuah organisasi yang mengoperasikan pelelangan ikan. Karena sejarah berdirinya yang demikian inilah, maka kemudian TPI sampai sekarang sering disebut sebagai *kongsi*.

Masalah penting yang ditangani oleh TPI adalah masalah perkreditan dan masalah penjualan ikan di pusat-pusat pendaratan ikan. Di dalam usaha untuk mengatasi kesulitan pengadaaan modal, TPI menjalin kontrak kredit dengan bank. Di bidang perdagangan ikan, setiap TPI mengoperasikan pusat pelelangan ikan. Dengan demikian, proses pelembagaan sektor penangkapan ikan meliputi pula masalah-masalah perdagangan ikan dan penanaman modal. Di bidang perdagangan, proses pelembagaan ini mendorong semakin berkembangnya perdagangan bebas produksi ikan, sedangkan di bidang permodalan, proses ini mengakibatkan semakin luasnya jangkauan kredit pemerintah untuk nelayan penangkap ikan. Dengan terbentuknya organisasi nelayan, penyaluran kredit dari bank pemerintah dapat menjangkau lapisan masyarakat nelayan yang lebih luas. Bank pemerintah pada saat ini telah tampil sebagai alternatif sumber modal bagi nelayan. Kredit tersebut digunakan oleh para nelayan anggotanya untuk berbagai keperluan, seperti membeli perahu baru, memperbaiki perahu, membeli jaring, membayar hutang, dan sebagainya. Dalam hal ini, kasus yang terjadi di Gempol Sewu, para nelayan, baik nelayan juragan maupun nelayan jurag, apabila mendapatkan pinjaman kredit dari pemerintah, maka pembayarannya hampir dapat dipastikan selalu "seret". Hal ini terjadi karena adanya anggapan bahwa uang yang dipinjamkan tersebut adalah milik negara, sehingga mereka merasa tidak perlu untuk mengembalikannya. Berbeda jika mereka melakukan peminjaman terhadap pedagang besar atau lintah darat, meskipun system pembayarannya sangat merugikan nelayan, mereka tetap akan membayarnya. Kondisi seperti itulah yang menyebabkan banyak nelayan di Gempol Sewu terjatuh hutang kepada para lintah darat yang sekaligus bertindak sebagai pedagang ikan.

Adanya perubahan terhadap investasi dan pemasaran produksi ikan setelah adanya TPI tersebut, oleh Masyhuri digambarkan dengan diagram sebagai berikut (Masyhuri, 1995: 225):



TPI, yang sering disebut dengan kata *kongsi*, sebenarnya adalah sebuah lembaga atau badan usaha pemerintah yang menjadi perantara nelayan dengan konsumen dalam pelelangan yang diselenggarakan oleh pihak TPI. Keberadaannya berbeda dengan pedagang perantara lain, baik dalam cara kerjanya maupun status kepemilikan barang. Cara kerja TPI menggunakan system lelang, yaitu dengan menyelenggarakan pelelangan hasil tangkapan nelayan yang harganya disesuaikan dengan harga di pasaran. Penentuan harga ini terjadi setelah ada kesepakatan antara pihak TPI dengan pihak nelayan. Pada system lelang ini pihak nelayan jelas mendapatkan keuntungan sesuai dengan imbalan yang seharusnya

mereka terima, karena hasil tangkapan mereka dijual dengan harga tertinggi dari para peserta lelang, dan harga dasar telah diperhitungkan sehingga kecil kemungkinan bagi nelayan untuk rugi. Dari segi kepemilikan, TPI tidak memiliki hasil tangkapan secara langsung dan keseluruhan, karena hanya sebagai perantara dalam pelelangan. Kepemilikan hasil tangkapan ini sangat berpengaruh pada proses distribusi selanjutnya.

Dengan berkembangnya pusat-pusat pelelangan ikan, pola perdagangan bebas semakin tumbuh, yaitu perdagangan ikan yang berpusat di tempat-tempat pelelangan ikan. Para nelayan mempunyai pilihan dalam memasarkan ikan yang mereka dihasilkan, dan penjualan ikan melalui pelelangan jelas merupakan salah satu pilihan bagi para nelayan di samping perdagangan dengan pola "kerumunan" jual-beli yang berpusat pada para pedagang ikan. Nelayan, dalam hal ini tidak sebagaimana sebelumnya, mempunyai posisi tawar-menawar yang lebih kuat. Dengan demikian, aktivitas perdagangan ikan yang ada mengalami proses pelembagaan pula. Meskipun demikian, system perdagangan bebas belum dapat dikatakan mendominasi perdagangan yang ada. Praktek-praktek dagang sebagaimana yang dilakukan oleh para pelepas uang masih terjadi di pusat-pusat pendaratan ikan. Selain itu, nelayan tidak dapat dengan serta-merta memutuskan keterikatannya dengan pelepas uang.

Kondisi TPI Gempol Sewu pada saat ini sudah cukup baik. Pada periode 1970-an, TPI memperkenalkan system "jumputan ikan" bagi kapal-kapal yang menjual ikannya di tempat tersebut. Sistem itu diperkenalkan oleh Martoyo. Namun, hasil jumputan itu sejak dahulu sampai sekarang tidak pernah terlihat manfaatnya. Melihat kenyataan itu, pada saat reformasi, keberadaan jumputan dihapuskan.

Problem utama di TPI Gempol Sewu adalah masalah permainan para pembeli ikan. Mereka ini sering memprovokasi para nelayan untuk menjual ikannya langsung kepada mereka dengan harga yang rendah.

Tindakan itu berhasil, karena TPI Gempol Sewu tidak dapat memberikan pembayaran hasil lelang ikan milik nelayan secara langsung. Para nelayan harus menunggu sekitar satu sampai dua jam untuk menerima uang hasil lelang ikannya. Kondisi itu disebabkan oleh para pembeli ikan yang sengaja mengulur-ulur waktu pembayaran ikan. Tindakan ini dilakukan dengan tujuan agar para nelayan tidak mau menjual ikannya di TPI. Usaha TPI untuk meminjam uang terlebih dahulu kepada pihak perbankan juga tidak memberi hasil yang memuaskan. Pedagang ikan yang mengetahui kalau TPI memiliki uang tunai akan lebih menunda-nunda pembayaran lelangnya. Harapan para pedagang itu, TPI menjadi bangkrut, sehingga penjualan ikan dapat dikuasai oleh para pembeli.

Problem lain yang terjadi di TPI adalah adanya para *pedagang iberan*, yaitu bakul ikan kecil-kecilan, yang di Gempol Sewu jumlahnya mencapai 90-an orang. Mereka ini selalu masuk ke lokasi TPI, padahal menurut aturan perilaku tersebut tidak diperbolehkan, karena hal itu akan membuat suasana TPI menjadi tidak representatif, menjadi kotor dan kumuh. Selain itu, mereka juga berusaha untuk membeli ikan kepada *anak alang-alang*, yaitu anak-anak yang memiliki ikan dengan jalan meminta atau kalau ada kesempatan yang memungkinkan mereka mencuri ikan dari perahu-perahu yang menjual ikan-ikannya ke TPI. Biasanya mereka beroperasi ketika para nelayan sedang memikul ikan dari perahu ke TPI. Adanya *pedagang iberan* yang bersedia membeli ikan-ikan dari *anak alang-alang* itu mendorong anak-anak itu untuk terus mencari ikan. Pedagang tersebut juga selalu berusaha membeli ikan dalam jumlah kecil kepada para nelayan tanpa melalui TPI.

Pada periode 1970-an, TPI Gempol Sewu dikuasai oleh kelompok tertentu, yaitu Martoyo dan kawan-kawannya. Mereka ini selain menguasai hasil jumptan nelayan, juga mengatur jalannya lelang ikan. Apabila ada orang atau pedagang ikan yang ragu-ragu untuk membeli ikan, maka mereka harus melakukan pendekatan khusus kepada

kelompok penguasa tersebut. Sehingga bagi sebagian orang kelompok mereka dianggap sebagai mafia TPI.

4.3. Pedagang Ikan

Salah satu bagian dari jaringan nelayan adalah pedagang ikan, yang aktivitasnya bergerak dalam jual-beli ikan. Di TPI Gempol Sewu terdapat dua jenis pedagang ikan, yaitu pedagang besar dan pedagang kecil yang sering disebut sebagai *pedagang iberan*. Pedagang besar atau pedagang penampung biasanya didominasi oleh orang-orang Cina, adalah pemilik modal yang terlibat dalam perdagangan ikan maupun dalam pengolahan ikan. Hasil yang diperolehnya itu dijual ke luar daerah, baik ke Bandung maupun ke Jakarta.

Para pedagang ikan ini tidak jarang sering memberi pinjaman uang kepada para pemilik perahu yang sedang membutuhkan uang. Pengembaliannya tidak dalam bentuk uang, akan tetapi dalam bentuk ikan hasil tangkapan nelayan tersebut. Dengan cara ini, pedagang ikan akan mengalami keuntungan yang sangat besar. Pertama, harga ikan yang dibayarkan jauh di bawah harga pasar; kedua, mereka selalu meminta berat timbangan ikan yang lebih dari kesepakatan semula. Misalnya, setiap satu tombong seharusnya beratnya 50 kg, maka mereka meminta menjadi 55 kg beratnya, dan seterusnya. Cara kedua yang sering dilakukan pedagang untuk menguasai nelayan Gempol Sewu adalah dengan iming-iming pembayaran yang lebih cepat dibandingkan dengan di TPI. Dengan cara itu mereka dapat merayu nelayan yang membutuhkan uang untuk menjual ikannya dengan harga murah.

Pedagang jenis kedua adalah *pedagang iberan*, atau sering juga disebut sebagai pedagang pengecer. Mereka biasanya didominasi oleh pedagang-pedagang ikan penduduk setempat. Mereka ini jumlahnya sekitar 90-an orang. Pada umumnya, *pedagang iberan* semata-mata memperdagangkan ikan, terutama ikan segar. Mereka sering juga memperdagangkan ikan olahan, seperti ikan asap, dan ikan pindang

menanggung resiko kerugian, karena di dalam system konsinyasi ini resiko penjualan ditanggung oleh pedagang ikan itu sendiri. Artinya, agen akan membayar ikan berdasarkan jumlah ikan yang laku terjual. Bila ikan tidak terjual atau rusak, atau yang lainnya, kerugian ditanggung oleh pedagang pemilik ikan. Dalam system ini, pedagang pemilik ikan dan pedagang penyalur atau agen dapat dikatakan mempunyai posisi tawar-menawar yang seimbang.

Para pedagang ikan ini tidak jarang sering memberi pinjaman uang kepada para pemilik perahu yang sedang membutuhkan uang. Pengembaliannya tidak dalam bentuk uang, akan tetapi dalam bentuk ikan hasil tangkapan nelayan tersebut. Dengan cara ini, pedagang ikan akan mengalami keuntungan yang sangat besar. Pertama, harga ikan yang dibayarkan jauh di bawah harga pasar; kedua, mereka selalu meminta berat timbangan ikan yang lebih dari kesepakatan semula. Misalnya, setiap satu tombong seharusnya beratnya 50 kg, maka mereka meminta menjadi 55 kg beratnya, dan seterusnya. Cara kedua yang sering dilakukan pedagang untuk menguasai nelayan Gempol Sewu adalah dengan iming-iming pembayaran yang lebih cepat dibandingkan dengan di TPI. Dengan cara itu mereka dapat merayu nelayan yang membutuhkan uang untuk menjual ikannya dengan harga murah.

Pedagang jenis kedua adalah *pedagang iberan*, atau sering juga disebut sebagai pedagang pengecer. Mereka biasanya didominasi oleh pedagang-pedagang ikan penduduk setempat. Mereka ini jumlahnya sekitar 90-an orang. Pada umumnya, *pedagang iberan* semata-mata memperdagangkan ikan, terutama ikan segar. Mereka sering juga memperdagangkan ikan olahan, seperti ikan asap, dan ikan pindang dalam jumlah yang terbatas. Karena sulitnya transportasi, lingkup operasional *pedagang iberan* ini, khususnya perdagangan ikan segar sangat terbatas, hanya di daerah-daerah sekitar pantai. Hanya ikan asap dan ikan pindang yang dapat diperdagangkan ke tempat yang lebih jauh di pedalaman. Dengan demikian hasil yang mereka peroleh di daerah

nelayan dapat mereka jual lagi ke pasar-pasar di luar desa baik dalam bentuk segar maupun sudah diolah.

Para *pedagang iberan* biasanya terdiri atas kaum wanita. Mereka mendapatkan ikan dengan cara membeli dari *anak alang-alang* maupun membeli langsung kepada para nelayan pemikul ikan, maupun kepada nelayan-nelayan yang melakukan penangkapan ikan dengan perahu-perahu kecil miliknya sendiri. Mereka juga menampung sebagian hasil tangkapan nelayan-nelayan lepas pantai yang tidak terlibat hutang kepada tengkulak. Sistem transaksi yang berlaku di antara mereka dan para nelayan pada umumnya adalah system *ngalap nyaur*. Dalam system ini posisi pedagang atau bakul ikan sangat dominan. Bakul ikan dapat membawa ikan tanpa membayar terlebih dahulu kepada nelayan. Baru setelah ikan terjual, pembayaran kepada nelayan dilakukan. Meskipun harga ikan telah ditetapkan pada waktu transaksi pembelian, nelayan dapat juga menerima pembayaran dengan jumlah lebih rendah dari harga yang telah disepakati bersama apabila ternyata harga pasaran pada waktu penjualan mengalami penurunan. Dengan alasan harga ikan ikut turun, para pedagang dapat saja merubah harga ikan yang telah disepakati itu. Dalam transaksi jual-beli seperti ini, resiko penjualan ditanggung oleh para nelayan sendiri. Pada tingkat pedagang pengecer yang lebih kecil, transaksi dilakukan dengan kontan. Sayangnya kemampuan serap pedagang seperti ini sangat terbatas sekali.

Pedagang pengecer yang memperdagangkan ikannya dalam jumlah yang cukup banyak biasanya selain menjualnya langsung secara eceran dengan pembayaran kontan, juga menjualnya kepada sub-sub pengecer dengan cara kredit. Sub pengecer menanggung resiko kerugian, jika tidak dapat menjual ikan dagangannya atau menjualnya dengan harga yang lebih rendah dari harga pembelian. Sementara itu pedagang pengecer menanggung resiko jika sub pengecer tidak membayar ikan yang berhasil dijualnya. Pedagang-pedagang pengecer dengan jumlah dagangan ikan yang terbatas umumnya menjajakan langsung ikan

dagangannya dari kampung ke kampung, baik dengan cara ataupun dengan cara menghutangkan kepada konsumen.

BAB V

DINAMIKA PENGELOLAAN HASIL LAUT DI DESA GEMPOL SEWU

5.1. Pengolahan dan Pengawetan Ikan

Indonesia adalah negara tropis, oleh karena itu, ikan dapat membusuk dalam waktu beberapa jam saja. Untuk mempertahankan ikan dalam keadaan baik dalam waktu yang cukup lama, agar ikan dapat diperjualbelikan, maka pengolahan atau pengawetan ikan merupakan cara yang harus dilakukan. Semakin baik proses pengolahan, dan semakin lama ikan dapat bertahan dalam keadaan baik, maka semakin luas pula kesempatan untuk memperdagangkannya. Selain asap dan terik matahari, garam merupakan satu-satunya bahan pengawet ikan yang dikenal oleh nelayan dalam proses pengawetan ikan. Penggunaan es untuk pengawetan ikan di Gempol Sewu baru muncul pada tahun 1970-an, dan secara umum dikenal pada tahun 1980-an. Sedangkan pengalengan ikan di Indonesia baru dikenal pada tahun 1930-an dan hanya dilakukan oleh industri penangkapan ikan nelayan asing. Dengan demikian, factor tersedia atau tidaknya garam berpengaruh besar terhadap aktivitas usaha penangkapan ikan rakyat pada umumnya.

Beberapa proses pengawetan ikan yang lazim dilakukan oleh nelayan-nelayan di Indonesia adalah pengasinan, yaitu pengolahan ikan untuk menjadi ikan asin atau ikan pedo, pemindangan (Ikan pindang), pengeringan (ikan gerah), dan pengasapan (ikan asap). Ketiga proses pengolahan ini menggunakan garam sebagai bahan bakunya. Cara lain adalah pengawetan ikan dengan pengasapan dan pengolahan menjadi trasi. Kedua cara pengawetan terakhir ini penggunaan garam kurang berperan. Selain itu, pengawetan ikan dengan pengasapan tidak dapat dilakukan secara sekaligus dalam jumlah banyak. Pengasapan juga lebih sulit dilakukan dan memerlukan biaya yang mahal, serta produksi ikan olahan yang dihasilkan tidak dapat bertahan lama. Hal inilah yang menyebabkan kurang populernya cara pengasapan sebagai salah satu

cara untuk mengawetkan ikan di kalangan nelayan. Ikan asap biasanya hanya merupakan konsumsi terbatas untuk daerah setempat. Demikian pula halnya pengolahan ikan menjadi trasi, selain tidak dapat dilakukan untuk semua jenis ikan, hanya terbatas pada pemanfaatan kepala udang, pengguna trasi tidak cukup besar terbatas hanya untuk bahan penyedap masakan.

Pengawetan ikan dengan cara mengeringkan untuk menjadi ikan kering atau guruh pada umumnya dilakukan dengan cara menjemur ikan pada panas matahari. Semakin terik panas matahari dan semakin banyak garam yang dibubuhkan, maka semakin cepat ikan-ikan itu menjadi kering. Dengan proses pengeringan yang semakin cepat, berarti kualitas ikan kering itu semakin baik. Pengawetan ikan dengan cara ini terutama dilakukan terhadap ikan-ikan yang berukuran kecil, atau ikan-ikan yang berukuran cukup besar setelah dipotong menjadi potongan yang kecil-kecil. Sistem pengawetan dengan mengasinkan dan mengeringkan ini merupakan cara sederhana dan populer di kalangan nelayan di daerah tropis.

Di Gempol Sewu terdapat beberapa jenis ikan guruh berdasarkan jenis bahan dasar ikannya. Jenis ikan sebagai bahan dasar dari ikan kering tersebut ternyata mempengaruhi harga pemasarannya. Harga paling murah pada jenis ikan kering ini adalah jenis guruh yang pembuatannya tidak *digesek*, atau tidak dibelah ikannya. Adapun jenis ikan yang digunakan antara lain meliputi ikan-ikan *rucahan*, yaitu ikan-ikan kecil yang bermacam-macam jenisnya; ikan *pethek*; ikan *layang* atau ikan *gatel*; ikan *selar*; ikan kembung; cumi-cumi; rebon (untuk dibuat *rese* atau *ebi*)¹; teri; dan teri nasi. *Guruh gesek* adalah guruh yang dibuat dengan membelah perut ikan, baru dikeringkan dan diasinkan. Untuk guruh jenis ini terbuat dari ikan *tiga waja*; ikan *lemahan*; dan ikan *kerot*. Guruh selanjutnya adalah guruh-guruh yang terbuat dari ikan-ikan yang spesifik,

seperti gereh layur, gereh jambal, gereh cucut, gereh tongkol, dan gereh manyung. Untuk keempat jenis gereh terakhir ini merupakan gereh-gereh yang berharga mahal.

Pengolahan ikan dengan cara memindang lebih rumit dari pada mengeringkan ikan, dan hanya orang-orang tertentu saja yang dapat melakukannya. Biasanya mereka terdiri atas suatu keluarga yang mempunyai kepandaian secara turun-temurun. Terlebih lagi, di dalam proses pemindangan ini diperlukan tempat yang relatif luas serta diperlukan adanya sarana-sarana pendukung yang memadai, seperti keberadaan tungku-tungku pembakaran, tersedianya *paso*, sebagai tempat pemindangan, serta yang tak kurang pentingnya adalah tersedianya kayu bakar dalam jumlah banyak. Oleh karena itu, pada proses pemindangan diperlukan banyak tenaga serta jaringan untuk kelancaran usahanya. Misalnya, untuk penyediaan kayu bakar harus digunakan kayu khusus, yaitu kayu pohon karet yang telah tua agar dihasilkan pindang yang maksimal kualitasnya. Untuk mendapatkan kayu bakar itu harus ada pendekatan dengan pihak Perhutani agar diijinkan untuk membeli kayu pohon karet yang telah tua itu. Kayu-kayu itu dibeli masih dalam bentuk glondongan, sehingga masih harus dipecah-pecah oleh seorang *blandong*. Demikian pula adanya petugas-petugas khusus yang menjaga agar nyala api tetap stabil, sehingga proses pemindangan dapat berjalan lancar.

Pengolahan ikan dengan cara pemindangan tidak dapat dilakukan secara besar-besaran seperti halnya pembuatan ikan kering. Karena ikan-ikan yang hendak dipindang harus ditata dengan rapi terlebih dahulu di dalam *paso*, yaitu gerabah yang berbentuk kualii besar, kemudian diberi air laut dan garam dalam jumlah yang dikehendaki, kemudian direbus sampai matang. Pindang yang direbus dengan menggunakan sedikit garam biasanya paling laku. Setelah proses perebusan selesai dan

¹ Perbedaan nama *rese* dan *ebi* terlihat dalam bentuk tebal dagingnya. *Rese* adalah udang kering yang dagingnya sangat tipis, sehingga hanya terlihat seperti kulit udang

setelah sisa-sisa air dituang bersih, paso kemudian ditutup dengan rapi menggunakan daun waru atau daun jati, setelah terlebih dahulu ditambahkan garam pada ikan tersebut. Semakin banyak garam yang dibubuhkan, semakin lama ikan pindang dapat disimpan dalam keadaan baik. Hasil sampingan dari proses pemindangan ini adalah adanya semacam petis yang dihasilkan dari air tuangan terakhir pada proses pemindangan (Jawa: *endheg-endheg*). "Petis" semacam ini biasanya dikonsumsi oleh penduduk di sekitar tempat pemindangan.

Di tempat juragan-juragan pindang yang besar, biasanya kesibukan memindang itu hampir dikatakan tidak pernah berhenti sepanjang hari. Hal itu disebabkan datangnya ikan sebagai bahan dasar untuk pemindangan datangnya tidak bersamaan, misalnya ada ikan yang datangnya pada siang hari, ada yang datangnya sore hari, malam hari, ataupun pada saat menjelang fajar. Pada juragan-juragan besar itu dalam sehari semalam, pada saat panen raya ikan, dapat diproduksi ikan pindang sekitar 2000 – 3000 paso. Dari informasi semacam ini, dapat diketahui betapa sibuk dan dinamisnya usaha pemindangan pada saat jaya-jayanya itu. Pada sekitar tahun 1970-an itu terdapat empat tempat pemindangan besar di Gempol Sewu, yaitu di tempat Solikun, Sundi, Ramli, dan Karto. Di tempat-tempat ini, selain pemilik "dapur" pemindangan yang membuat pindang, terdapat juga kelompok-kelompok penyewa "dapur" itu dari daerah lain seperti dari daerah Karang Ampel dekat Cirebon. Kemunculan pendatang dari luar ini biasanya bermula dari transaksi jual-beli pindang yang dilakukan oleh orang-orang dari Karang Ampel itu, karena memang hasil pindang itu pada tahun 1970-an dipasarkan di daerah Bandung dan sekitarnya. Biasanya seiring dengan keberhasilan mereka dalam mengusahakan ikan pindang itu, maka anggota keluarganya yang berada di Cirebon diboyong ke Gempol Sewu untuk membantu usaha yang telah mereka rintis itu. Dengan demikian terjadilah pemekaran pengusaha yang berasal dari luar daerah Gempol Sewu sendiri.

Dengan demikian terjadilah pemekaran pengusaha yang berasal dari luar daerah Gempol Sewu sendiri.

Semua jenis ikan dapat digunakan sebagai bahan dasar untuk pemindangan. Jenis ikan tidak ditentukan, hanya tergantung pada hasil tangkapan nelayan, karena masing-masing jenis ikan itu mempunyai musim sendiri-sendiri. Pada umumnya ikan yang dipindang di Gempol Sewu adalah ikan tongkol, ikan selar, ikan kembung, ikan juwi, ikan benthong, ikan gapak, dan ikan dorang. Dari berbagai jenis ikan ini, yang paling tinggi harganya adalah pindang ikan tongkol.

Pengasapan ikan merupakan teknologi pengawetan ikan yang tidak begitu populer di Gempol Sewu. Aktivitas ini dilakukan oleh para nelayan di rumahnya masing-masing dalam kapasitas yang relatif sedikit, dan hanya dipasarkan di daerah setempat saja. Jarang terjadi aktivitas pengasapan yang besar-besaran, karena memang teknologi cara pembuatannya yang relatif rumit. Peralatan yang mereka gunakan sederhana saja, yaitu digunakannya arang batok kelapa sebagai bahan bakarnya serta dibuat semacam para-para sebagai tempat untuk pemanggangan ikan. Ikan yang dihasilkan dari proses pengasapan ini bentuk luarnya seperti gosong serta rasanya cukup unik, yaitu berbau asap sangit, sebagai ciri khas masakan hasil pengasapan. Aktivitas ini meskipun tidak diproduksi secara besar-besaran, sampai sekarang masih tetap bertahan. Ikan-ikan yang biasa digunakan sebagai ikan panggang adalah ikan pe atau ikan pari, ikan tongkol, ikan manyung, ikan kembung, ikan selar, dan ikan pethek. Dari semua jenis ikan itu yang paling favorit adalah ikan manyung, karena rasanya paling gurih serta harganya paling tinggi.

Sebelum dikenal teknologi pengawetan ikan dengan menggunakan es, hampir semua ikan yang dihasilkan oleh para nelayan Gempol Sewu diolah untuk dijadikan ikan asin atau ikan pindang. Ada hal unik pada diri para pengusaha pengolahan ikan dari Gempol Sewu itu. Mereka ternyata bukan merupakan penduduk asli Gempol Sewu, melainkan merupakan

warga pendatang dari daerah Karang Ampel Cirebon, Brebes, dan daerah-daerah lainnya. Mereka pindah dan menetap ke Gempol Sewu karena di desa inilah mereka mempunyai usaha dan mendapatkan kehidupan. Pada awalnya mereka hanya berdagang atau membeli ikan di Gempol Sewu. Lama-kelamaan mereka membuka usaha di desa tersebut dengan mengolah ikan menjadi pindang atau ikan asin. Secara bertahap, kemudian mereka mengajak anggota-anggota keluarganya yang lain untuk membantu usahanya di Gempol Sewu itu. Semakin lama usahanya semakin maju dan hal itu menjadikan mereka memutuskan untuk menetap sebagai warga Gempol Sewu. Keputusan mereka ini berdasarkan karena mudahnya mendapatkan bahan baku ikan sebagai bahan dasar untuk usahanya. Pada periode tahun 1970-an terdapat nama-nama Solikun, Sundi, Ramli dan Karto, sebagai pengusaha ikan pindang. Hasilnya dijual ke Bandung dan Jakarta. Sementara nama-nama Fatimah, Rukemah, Wachid, dan Kawi merupakan pengusaha ikan asin (*gerek*).

Hambatan bagi mereka dalam menjalankan usahanya muncul ketika TPI Desa Gempol Sewu mulai dikuasai oleh kelompok-kelompok tertentu. Kelompok ini selalu berusaha untuk mendapatkan keuntungan dari kegiatan nelayan dan pedagang ikan di TPI. Mereka tidak segan-segan untuk mengembargo seorang pembeli ikan yang tidak mau bekerjasama. Akibatnya banyak pengusaha ikan asin dan pindang yang kesulitan mendapatkan bahan baku bagi usaha mereka.

Pada saat ini ikan-ikan di TPI Gempol Sewu tidak lagi diolah menjadi ikan pindang maupun ikan asin. Hal itu mulai berjalan sejak digunakannya es dalam teknologi pengawetan ikan sejak tahun 1970-an. Oleh karena itu, secara berangsur-angsur pembuatan ikan pindang dan ikan asin menjadi semakin langka, bahkan pada tahun 1980-an dapat dikatakan mati. Pada saat ini pengusaha ikan pindang maupun ikan asin tidak sebesar dahulu, karena hanya terbatas untuk dipasarkan di pasar-pasar sekelilingnya. Sejak tahun 1980-an sampai saat ini, ikan-ikan dari Gempol Sewu dijual dalam bentuk ikan segar. Kualitas ikan-ikan itu

sangat baik, karena nelayan hanya membutuhkan satu hari untuk melaut. Ikan segar dari daerah ini banyak dijual ke Jakarta dan Semarang. Pada umumnya ikan-ikan yang dijual sebagai ikan segar itu adalah cumi-cumi, ikan lowang, dan udang, terutama udang bago. Jenis udang bago inilah yang harganya sangat tinggi, karena biasanya untuk diekspor. Ikan tengiri yang cara penangkapannya menggunakan pancing juga merupakan salah satu ikan yang berharga tinggi. Ikan jenis ini biasanya ukurannya sangat besar. Ikan-ikan segar tersebut di dalam pengiriman ke tempat tujuan biasanya ditempatkan pada tong-tong plastik yang diberi es, atau ditempatkan pada kotak-kotak kayu yang dilapisi dengan daun jati agar es batu yang digunakan sebagai sarana pengawet kesegaran ikan tidak dapat segera mencair. Pada saat ini cara pengemasan ikan segar adalah dengan menggunakan kotak-kotak yang terbuat dari gabus yang lebih efektif penggunaannya.

Hampir dapat dipastikan pada perdagangan ikan segar ini tidak ditemui kendala yang menghambat jalannya proses jual-beli. Satu-satunya resiko yang menghantui para juragan ikan segar adalah adanya "bajing loncat" – "bajing loncat" yang sering merampas hasil penjualan ikan mereka. Kadang-kadang para bandit itu merampas di tengah jalan ketika ikan belum sampai di tempat tujuan, atau kadang-kadang juga sering menghadang truk-truk yang telah kembali dari menjual ikan yang diangkutnya. Kerugian yang diderita sang juragan tidak sedikit dalam kasus seperti ini, akan tetapi kasus-kasus yang terjadi semacam ini sekarang dapat dikendalikan. Terlebih lagi, pada saat ini proses pembayaran penjualan tidak selalu dalam bentuk uang tunai, dan hal ini justru lebih mengamankan hasil penjualan itu.

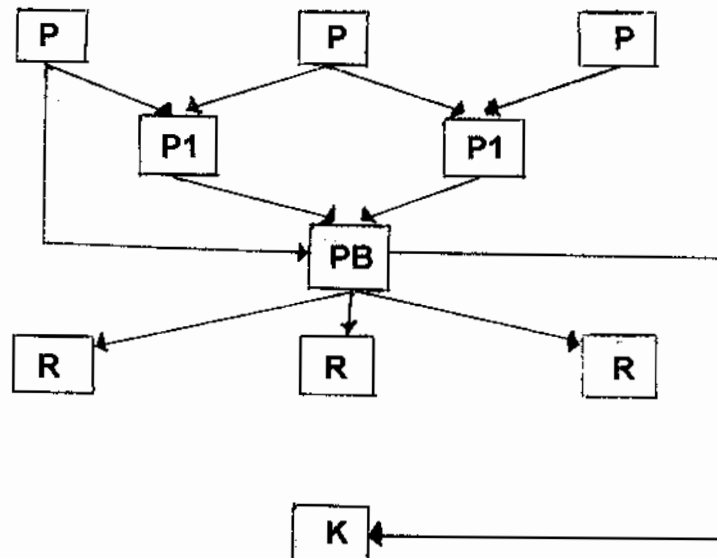
5.2. Distribusi dan Proses Pemasaran Ikan

Di dalam perekonomian, terdapat tiga aspek pokok, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Dalam pengertian ekonomi, secara umum proses

dan kegunaan barang dan jasa, sedangkan konsumsi adalah penggunaan barang dan jasa hasil produksi. Ketiga proses ini adalah proses dasar yang tidak dapat dikesampingkan dan sangat berpengaruh terhadap kelancaran kehidupan perekonomian, maka apabila timbul permasalahan dan ketidakwajaran dalam proses ini akan berakibat buruk bagi pelaku-pelaku ekonomi. Demikian juga yang terjadi dalam kehidupan perekonomian nelayan, proses ini sangat penting karena dapat mempengaruhi tingkat kesejahteraan nelayan secara tidak langsung, di luar factor besar-kecilnya hasil tangkapan.

Saluran distribusi dan pemasaran dalam kehidupan perekonomian nelayan pada umumnya terdiri atas nelayan sebagai produsen, pedagang perantara sebagai pengumpul hasil tangkapan, pedagang grosir yang biasanya membeli ikan dari pedagang pengumpul local, pedagang eceran, dan konsumen yang menggunakan industri pengolahan maupun rumah tangga. Pelaku-pelaku ekonomi inilah yang menyelenggarakan distribusi hasil tangkapan dari nelayan ke tangan konsumen. Pelaku-pelaku ini dapat dibagi menjadi dua kelompok , yaitu kelompok produsen dan pedagang perantara. Kelompok produsen adalah mereka yang tugas utamanya menghasilkan ikan atau hasil tangkapan lain. Disamping itu, mereka juga berhak untuk melakukan aktifitas distribusi dengan memasarkan langsung hasil tangkapannya ke tangan konsumen. Pedagang perantara adalah kelompok atau perorangan yang membeli atau mengumpulkan barang dari produsen kemudian menyalurkannya ke tangan konsumen. Gambaran distribusi perikanan yang secara umum dijumpai di Jawa Tengah dapat digambarkan secara singkat dalam bentuk skema berikut ini, seperti yang telah digambarkan oleh A.M. Hanafiah dan A.M. Saefuddin dalam bukunya *Tata Niaga Hasil Perikanan* (Hanafiah, A.M, 1983:27).

Skema Distribusi Perikanan



Keterangan:

- P : Produsen (nelayan)
- P1 : Pedagang Pengumpul Lokal
- PB : Pedagang Besar
- R : Pedagang Pengecer
- K : Konsumen

Melihat rantai distribusi yang demikian ini, terlihat bahwa kedudukan pedagang perantara sangat vital dan menentukan kelancaran proses distribusi. Hal ini berlaku juga untuk kehidupan perekonomian nelayan di desa Gempol Sewu. Keberadaan lembaga atau usaha perseorangan sebagai pedagang perantara sangat dominan dalam menentukan posisi tawar-menawar harga untuk masing-masing pelaku ekonomi, termasuk di dalamnya nelayan sebagai produsen. Dalam kehidupan perekonomian nelayan di desa Gempol Sewu, produsen utamanya adalah nelayan, sedangkan posisi pedagang perantara ditempati oleh pedagang pengumpul local yang sering disebut sebagai *bakul* oleh nelayan setempat. Adapun TPI yang sering disebut sebagai

kongsi oleh masyarakat setempat, adalah sebuah lembaga atau badan usaha pemerintah yang menjadi perantara antara nelayan dengan konsumen dalam pelelangan yang diselenggarakan oleh pihak TPI. *Bakul* adalah pengusaha yang melakukan pengumpulan hasil tangkapan dari nelayan local untuk dijual lagi ke pedagang besar, ataupun dijual langsung kepada para pedagang pengecer. Selain itu *bakul* juga berfungsi sebagai pemberi kredit kepada nelayan. *Bakul* biasanya mempunyai tempat usaha sendiri untuk proses jual-belinya di luar TPI. Tempat aktivitas jual-beli *bakul* itu menurut istilah nelayan setempat sering disebut sebagai *depot*.

TPI adalah lembaga pemerintah yang bertugas untuk menjadi perantara proses jual-beli antara nelayan dengan konsumen. Akan tetapi, harus dibedakan antara TPI dengan pedagang perantara lainnya, karena TPI berbeda dalam cara kerjanya maupun dalam status kepemilikan barang. Cara kerja TPI menggunakan system lelang, yaitu dengan menyelenggarakan pelelangan hasil tangkapan nelayan yang harganya disesuaikan dengan harga di pasaran. Hal ini juga terjadi setelah ada kesepakatan antara pihak TPI dengan pihak nelayan. Pada system pelelangan ini, nelayan jelas mendapatkan keuntungan sesuai dengan imbalan jerih payah yang seharusnya mereka terima, karena hasil tangkapannya dijual dengan harga tertinggi dari para peserta lelang. Sedangkan harga dasar telah diperhitungkan sehingga kecil kemungkinan bagi nelayan untuk rugi. Hal ini berbeda dengan system yang dipergunakan oleh *bakul*, mereka biasanya melakukan pembelian langsung dari nelayan yang harganya ditentukan oleh *bakul* secara sepihak sebagai pemegang kendali atas harga. Harga yang ditetapkan oleh *bakul* biasanya berada di bawah harga pasar, apalagi jika nelayan mempunyai hutang dengan *bakul* tersebut. Dari segi kepemilikan, TPI tidak memiliki hasil tangkapan secara langsung dan keseluruhan, karena hanya bersifat sebagai perantara dalam pelelangan. Sedangkan *bakul* memiliki secara keseluruhan setelah membeli barang dari nelayan. Faktor kepemilikan hasil tangkapan sangat berpengaruh pada proses distribusi

selanjutnya. *Bakul* yang memiliki hasil tangkapan secara pribadi dapat menjual dengan harga yang ditentukannya sendiri tanpa melakukan pemotongan ataupun pembagian hasil untuk nelayan.

Bakul dan TPI sebagai saluran distribusi yang dominan dalam kehidupan perekonomian nelayan di Gempol Sewu mempunyai hubungan yang kurang harmonis dalam kinerjanya. Sering terjadi persaingan antara TPI dan bakul dalam proses proses distribusi hasil tangkapan nelayan. TPI sering mempengaruhi nelayan dengan mengatakan bahwa bakul merugikan bagi pihak nelayan, sedangkan bakul memanfaatkan kelambatan cara pembayaran dan diskriminasi dalam pelelangan oleh TPI untuk menarik para nelayan. Selain itu, keterikatan nelayan yang mempunyai hutang kepada bakul sangat menguntungkan para bakul, karena nelayan harus menjual hasil tangkapannya kepada bakul dengan selisih harga di bawah harga pasaran. Selisih harga antara TPI dengan bakul berkisar antara Rp. 1500,00 sampai Rp. 2000,00 setiap kilogramnya. Meskipun demikian, terdapat kerjasama di antara mereka untuk menekan pembeli dari luar daerah yang berani memberikan harga yang lebih tinggi. TPI dan bakul menghentikan transaksi jika nelayan menjual hasil tangkapan pada pedagang luar daerah yang memberi harga lebih tinggi, mereka juga melakukan sabotase pada kendaraan yang digunakan oleh pedagang tersebut.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Nelayan adalah sama halnya dengan petani, yaitu sebagai produsen pertama dalam salah satu sector produksi. Nelayan sebagai masyarakat sederhana adalah pelaku ekonomi yang sebenarnya tidak terlalu berlebihan dalam memandang kehidupan ini. Mereka cenderung untuk berpikiran taktis serta praktis dan tidak suka terhadap hal-hal yang bertele-tele. Oleh karena itu, mereka tidak suka terhadap TPI karena kelambanannya dalam system pembayaran, meskipun mereka tahu bahwa jika menjual ikan ke bakul mereka banyak dirugikan. Akan tetapi, mereka senang karena mereka langsung mendapatkan uang. Selain itu, mereka lebih percaya pada bakul karena hubungan *patron-client* di antara keduanya.

Kegiatan pengelolaan hasil tangkapan di Gempol Sewu pada saat ini sebagian besar dijual dalam bentuk ikan segar berkat adanya es sebagai salah satu cara untuk pengawetan ikan segar. Ikan-ikan itu dijual dalam jumlah besar selain untuk di pasarkan di pasar-pasar besar di Jakarta atau di Semarang, juga dipasarkan sebagai barang ekspor. Keberadaan pengawetan ikan dalam bentuk pindang, gereh, dan ikan asap pada saat ini hanya untuk konsumsi daerah setempat saja.

Ada beberapa factor yang menghambat pemanfaatan teknologi bagi nelayan dalam proses kegiatan pasca penangkapan. Faktor pertama adalah masalah perekonomian para nelayan itu sendiri, karena pada permasalahan ini dibutuhkan biaya yang besar untuk dapat menghasilkan produk yang berkualitas. Seperti diketahui bersama, bahwa kehidupan nelayan itu sebagian besar terjerat hutang baik kepada para bakul ataupun para tengkulak yang sering membeli hasil produksinya secara ijon. Faktor kedua adalah tingkat pendidikan. Dengan adanya peningkatan pendidikan pada masyarakat nelayan, akan lebih mudah untuk mengubah

pola pikir yang telah berurat akar selama ini. Dengan adanya tingkat pendidikan yang lebih tinggi ini, maka penyaluran kredit yang dikeluarkan oleh bank-bank pemerintah akan lebih bermanfaat. Dengan demikian diharapkan akan terjadi peningkatan ekonomi pada pihak nelayan itu sendiri.

6.2. Saran-Saran

Untuk dapat mengangkat kesejahteraan para nelayan ada beberapa saran sebagai berikut:

1. Perlu adanya organisasi kelompok nelayan, semacam koperasi, untuk dapat mengangkat kesejahteraan para anggotanya melalui system penjualan hasil produk mereka, sehingga peran para tengkulak dan bakul dalam pembelian secara system ijon secara perlahan-lahan dapat dihapuskan.
2. Perlu adanya program Bimbingan Masyarakat (Bimas) dari instansi pemerintah terkait untuk memberikan pembinaan dan pengarahan kepada para nelayan pada waktu-waktu tertentu.
3. Peran TPI seharusnya ditingkatkan, terutama dalam system pembayaran hasil produksi, agar tidak ditinggalkan oleh para nelayan.

DAFTAR PUSTAKA

- Hanafiah, A.M. dan A.M. Saefuddin, *Tata Niaga Hasil Perikanan*, Jakarta: UI-Press, 1983.
- Boomgaard, P., *Children of the Colonial State: Population Growth and Economic Development in Java, 1795-1880*, Amsterdam: Free University Press, 1989.
- Dwi Any Laksitawati, "Perkembangan Masyarakat Nelayan di Desa Sendang Sikucing Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal Tahun 1971-1990", *Skripsi Sarjana*, Semarang: Jurusan Sejarah Fak. Sastra UNDIP, 2001.
- Masyhuri, *Pasang Surut Usaha Perikanan Laut: Tinjauan Sosial-Ekonomi Kenelayanan di Jawa dan Madura, 1850-1940*, Leiden: Vrije Universiteit, 1985.
- , *Menyisir Pantai Utara*, Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusantara, 1996.
- Mubyarto, dkk., *Nelayan dan Kemiskinan: Studi Ekonomi Antropologis di Dua Desa Pantai*, Jakarta: Rajawali, 1984.
- Sutejo K. Widodo, "Teknologi dan Disparitas Sosial: Studi Kasus Atas Masyarakat Nelayan Ujung Batu, Kabupaten Jepara", *Lembaran Sastra*, Edisi Khusus, No. 19, Th. 1996, hlm. 126-132.
- , "Perubahan Sosial dan Struktur Sosial Pada Masyarakat Nelayan", *Lembaran Sastra*, No.2, Th. XXIV, April 2000, hlm. 181-191.